

Pemprov Kalbar Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2019



PONTIANAK, SP - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2019 sudah dibuka. Dalam forum ini, pemangku kepentingan membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kerja di setiap kabupaten/kota, khususnya topik strategis dalam menyongsong pembangunan di Kalimantan Barat ke depan.

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji dalam kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa dalam rangka menyelaraskan penyusunan RKPD tahun 2019, tentunya sudah terlebih dahulu diadakan Musrenbang tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, kata Dodi dalam Musrenbang tingkat provinsi ini semua program akan diselaraskan, termasuk dengan provinsi tetangga. Dirinya berharap, ke depan untuk program 2019 mendatang, tidak saja bisa diselaraskan antar kabupaten/kota dengan Provinsi, namun juga dengan provinsi tetangga

“Mudah-mudahan di dalam rangka untuk menyusun kegiatan dan program tahun 2019 ini, nantinya kita bisa menyelaraskan antara program provinsi, kabupaten/kota dan program provinsi tetangga, intinya seperti itu, “ ujarnya.

Dirinya juga telah menuangkan apa yang menjadi tujuan pokok dari pemerintah provinsi. Dalam program yang disebut tri sukses atau tiga pokok program ini, mesti bisa menjadi prioritas, di antaranya sukses Pilkada, pemerintahan bisa berjalan stabil dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, kata Dody, Kalimantan Barat saat ini berada pada angka 5,20 persen sampai 5,70 persen, dan itu diklaim meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 5,17 persen.

Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamruzaman yang juga ketua panitia penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Povinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya menyebutkan, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan intansi/lembaga pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mejamin program dan kegiatan dapat terlaksana secara sistematis, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan perecanaan untuk intansi pemerintah sendiri, lanjut Kamaruzaman telah diatur dalam sebuah regulasi khusus yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan turunannya.

“Namun acapkali pada kenyataanya yang terjadi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan intansi pemerintah masih ada yang justru belum tersusun dan terintegrasi dengan baik dengan perencanaan makro di tingkat provinsi dan nasional,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dalam upaya membangun keterpaduan dalam penyelenggaraan perencana program, dan kegiatan pembangunan pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat, harus melalui pendekatan partisipatif dengan bertumpu pada penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota terhadap, perencanaan yang telah dilakukan seluruh stakholder.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Diah Idrajati yang hadir pada kesempatan tersebut, menuturkan bahwa dasar dari untuk pelaksanaan program ke depan juga tentunya akan mendengar pokok-pokok pikiran dari pihak DPRD Provinsi

"Ini nanti yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program ke depan, karena ini juga sudah tahun terakhir dari konsistensi antara RPJMN dengan RPJMD. Terlebih ini merupakan RPJMD terakhir bagi Kalbar. Nah, nanti yang harus dilihat kembali, apakah dengan RPJMD terakhir ini cita-cita 20 tahun Kalimantan Barat sudah mendekati sebagaimana yang sudah dicanangkan dan direncanakan,” terangnya.

Disinggung mengenai korelasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalbar dengan masih tingginya angka kemiskinan dibandingkan provinsi lain di pulau Kalimantan, Diah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menemukan jawabannya, sebab sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Kalbar dipandang cukup bagus.

“Memang masih, tapi tadi sudah disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup bagus tapi kemiskinannya masih di bawah nasional, berarti harus dicari apa penyebabnya. Apakah pemerataannya atau apa. Kok angka kemiskinannya masih tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya bagus, daerah harus mencari ini apa penyebabnya,” kata Diah. **(nak/bob)**

Sumber :

1. <http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2018/04/11/pemprov-kalbar-gelar-musrenbang-rkpd-tahun-2019>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/06/pemprov-kalbar-gelar-musrenbang-rkpd-2018>

Catatan Berita :

- Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- Pasal 22 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Adapun menurut pasal 24 dan 25, Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
- Berdasarkan pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD yang disusun Bappeda, disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan RKPD;
 - b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. Penyusunan rancangan RKPD;
 - d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. Penetapan RKPD.